



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke - 2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 29 Maret 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Provinsi Sumatera Utara;</li><li>- Provinsi Sumatera Selatan;</li><li>- Provinsi Jawa Barat;</li><li>- Provinsi Jawa Tengah;</li><li>- Provinsi Jawa Timur;</li><li>- Provinsi Maluku;</li><li>- Provinsi Kalimantan Tengah; dan</li><li>- Provinsi Bali</li></ul> 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah;
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 50 (lima puluh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan Komite I DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali) ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, pada hari Rabu, 29 Maret 2023, dibuka pukul 10.24 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali) ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

### 1. Laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-05/Pres/01/2023 tanggal 25 Januari 2023** perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
- b. Berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Februari 2023 dan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/103/PW.01/02/2027 tertanggal 7 Februari 2023** memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 8 (delapan) RUU usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI, yaitu:

1. RUU tentang Provinsi Sumatera Utara;
  2. RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan;
  3. RUU tentang Provinsi Jawa Barat;
  4. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah;
  5. RUU tentang Provinsi Jawa Timur;
  6. RUU tentang Provinsi Maluku;
  7. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
  8. RUU tentang Provinsi Bali.
- c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi Komisi II DPR RI pada tanggal 13 Februari 2023, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
- i. **Pada tanggal 13 Februari 2023** diadakan Rapat Kerja dalam rangka pembicaraan Tingkat I (yang dilaksanakan secara fisik dan virtual) antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan Wakil-wakil Pemerintah dengan agenda Penjelasan dan keterangan DPR RI atas 8 (delapan) RUU usul DPR RI, Pengantar dan pandangan Pemerintah terhadap 8 (delapan) RUU usul DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan 8 (delapan) RUU usul DPR RI sebagaimana dimaksud.
  - ii. **Pada tanggal 16-18 Maret 2023** Panja Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yang dijadikan sebagai sampel, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, khusus kunjungan kerja Panja Ke Provinsi Bali diadakan pada tanggal 17-19 Maret 2023.
  - iii. Rapat Dengar Pendapat Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bappenas **pada tanggal 20 Maret 2023**, dengan agenda rapat adalah pembahasan DIM.
  - iv. **Pada tanggal 20 Maret 2023** Rapat Panja RUU tentang 8 (delapan) Provinsi dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bappenas sepakat dilakukan Rapat Panja untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan **Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi** dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tentang Provinsi Bali.
  - v. **Pada tanggal 21 Maret 2023** dilaksanakan lanjutan **Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi** dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tentang Provinsi Bali dan RUU 8 (delapan) Provinsi.

- vi. **Pada tanggal 27 Maret 2023** dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang 8 (delapan) Provinsi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Maluku dan Gubernur Provinsi Bali.
  - vii. **Pada tanggal 28 Maret 2023** dilaksanakan Rapat Panja RUU tentang 8 (delapan) Provinsi dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bapenas dengan pembahasan dan persetujuan terhadap DIM RUU tentang Provinsi Bali dan persetujuan terhadap pembahasan DIM RUU 7 (tujuh) Provinsi dari hasil Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
  - viii. Rapat Kerja Tk. I, **tanggal 29 Maret 2023**, dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi – Fraksi, Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draft RUU 8 (delapan) RUU Provinsi.
2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang** tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.
  - b. DPD RI **menyetujui terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang** tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.
  - c. Pemerintah **menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang** tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali) ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.18 WIB.

**Jakarta, 29 Maret 2023**

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

**A-270**